

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika
KABUPATEN TANAH LAUT



DISKOMINFO
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dan mengacu kepada RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2025, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Pelaihari, 05 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	24
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
BAB V PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Renja Tahun 2023 SKPD.....	8
Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023	11
Tabel 2.2.1 Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi	24
Tabel 2.4.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	28
Tabel 3.2.1 Tabel Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	28
Tabel 4.1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tanah Laut	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu diperlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Tanah Laut sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai *E-Government*. Tantangan besar dalam implementasi *E-Government* terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah telah menyusun dokumen perencanaan strategis SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari RPD Kabupaten Tanah Laut, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ialah mewujudkan tujuan **“Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** dan **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen rencana pembangunan

untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2025, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana

- Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
 22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun 2023

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah, review terhadap RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama masa jangka menengah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Renja Perangkat Daerah.

BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi), dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tahun 2023 dalam tabel 2.1 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Renja Tahun 2023 dan realisasi Renja Tahun Berjalan 2024 dalam tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan).

Tabel 2.1.1 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Renja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD			Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian		Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP SKPD	Nilai	80	78,05	97,56	
			Nilai RB SKPD	Nilai	-	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	85,00	103,66	
Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut			Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut		Persentase informasi yang disebarkan	Persen	100	100	100	

	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	Persen	27	27	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)		Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi	Persen	20	20	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	20	20	100	
Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut			Persentase SKPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persen	8,9	8,9	100	

	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	Persen	100	100	100	
Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut			Persentase inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	Persen	100	100	100	
			Persentase SKPD yang menerapkan e-government	Persen	100	90	90	
Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut			Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persen	100	90	90	
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD		Persentase statistik sektoral daerah	Persen	100	100	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Buku	1	1	100	

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.197.574.798		822.369.063		1.529.040.246		992.321.277		1.176.490.376		4.520.220.962		86,97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	2.900.000	20	-	25	-	60	2.100.000	100	800.000	100	2.900.000	100,00%	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	7	2.000.000	2	-	3	-	1	1.400.000	1	600.000	7	2.000.000	100,00%	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	900.000	2	-	2	-	1	700.000	1	200.000	6	900.000	100,00%	100,00%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	3.840.388.971	25	570.263.224	30	1.213.993.943	70	730.739.404	100	717.251.504	100	3.232.248.075	100,00%	84,16%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	3.836.888.971	20	569.928.224	20	1.213.993.943	20	729.631.643	20	716.333.504	20	3.229.887.314	90,91%	84,18%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	3.500.000	1	335.000	1	-	2	1.107.761	1	918.000	5	2.360.761	100,00%	67,45%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	446.977.569	25	69.803.978	25	119.369.830	100	43.052.000	100	199.500.245	100	431.726.053	100,00%	96,59%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.683.943	1	5.850.000	-	-	-	280.000	-	-	1	6.130.000	100,00%	91,71%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	91.113.045	4	5.994.400	4	15.021.000	4	8.950.000	4	55.500.000	4	85.465.400	100,00%	93,80%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.080.527	1	8.881.300	-	-	-	-	-	-	1	8.881.300	100,00%	88,10%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	16.500.054	-	-	1	2.080.000	2	8.800.000	-	4.298.000	3	15.178.000	100,00%	91,99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.600.000	2	-	2	1.120.000	2	840.000	2	1.120.000	2	3.080.000	100,00%	85,56%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1	9.825.000	1	9.825.000	100,00%	98,25%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	309.000.000	16	49.078.278	53	101.148.830	5	24.182.000	26	128.757.245	100	303.166.353	100,00%	98,11%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%)	100	24.218.182	-	-	-	-	-	-	100	23.231.000	100	23.231.000	100,00%	95,92%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	24.218.182	-	-	-	-	-	-	1	23.231.000	1	23.231.000	100,00%	95,92%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	753.640.076	20	172.611.861	50	179.753.073	70	186.544.073	100	183.280.027	100	722.189.034	100,00%	95,83%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	191.000.000	3	35.935.901	3	40.289.133	3	44.292.153	3	43.816.087	12	164.333.274	100,00%	86,04%				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	562.640.076	3	136.675.960	3	139.463.940	3	142.251.920	3	139.463.940	12	557.855.760	100,00%	99,15%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	129.450.000	25	9.690.000	45	15.923.400	75	29.885.800	100	52.427.600	100	107.926.800	100,00%	83,37%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	41.000.000	1	3.410.000	1	8.042.400	1	6.550.000	1	14.904.600	1	32.907.000	100,00%	80,26%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	72.000.000	8	6.280.000	8	7.881.000	8	17.785.800	8	26.623.000	8	58.569.800	100,00%	81,35%				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	25	16.450.000	-	-	-	-	12	5.550.000	13	10.900.000	25	16.450.000	100,00%	100,00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	93,29%	86,97%	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.525.009.634		107.278.000		626.800.739		1.389.388.750		1.034.954.230		3.158.421.719		89,60%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (%)	100	3.525.009.634	25	107.278.000	50	626.800.739	75	1.389.388.750	100	1.034.954.230	100	3.158.421.719	100,00%	89,60%	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	12	100.021.919	3	6.892.500	3	15.012.500	3	9.882.500	3	59.738.750	12	91.526.250	100,00%	91,51%	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	12	2.983.994.515	3	36.000.000	3	494.860.000	3	1.277.064.500	3	826.930.000	12	2.634.854.500	100,00%	88,30%	
Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	100	440.993.200	28	64.385.500	68	116.928.239	4	102.441.750	-	148.285.480	100	432.040.969	100,00%	97,97%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	89,60%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			6.510.058.342		39.849.000		942.740.652		41.215.000		5.096.538.908		6.120.343.560		94,01%	

	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	6.344.058.342	20	39.849.000	20	942.740.652	60	26.305.000	100	4.981.098.908	100	5.989.993.560	100,00%	94,42%		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	1	6.344.058.342	1	39.849.000	1	942.740.652	1	26.305.000	1	4.981.098.908	1	5.989.993.560	100,00%	94,42%		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (%)	100	166.000.000	10	-	10	-	40	14.910.000	100	115.440.000	100	130.350.000	100,00%	78,52%		
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	5	166.000.000	-	-	-	-	1	14.910.000	4	115.440.000	5	130.350.000	100,00%	78,52%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	94,01%	
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			32.276.510		-		-		-		30.020.000		30.020.000			93,01%	

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut (%)	100	32.276.510	10	-	10	-	80	-	100	30.020.000	100	30.020.000	100,00%	93,01%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	2	32.276.510	-	-	-	-	-	-	2	30.020.000	2	30.020.000	100,00%	93,01%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	93,01%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			17.685.000		-		-		-		16.185.000		16.185.000		91,52%	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah (Layanan)	100	17.685.000	10	-	40	-	80	-	100	16.185.000	100	16.185.000	100,00%	91,52%	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	20	17.685.000	-	-	-	-	-	-	20	16.185.000	20	16.185.000	100,00%	91,52%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	91,52%

					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			15.282.604.284	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		97,72%	90,59%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

a. Fungsi Kepala Dinas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Dinas

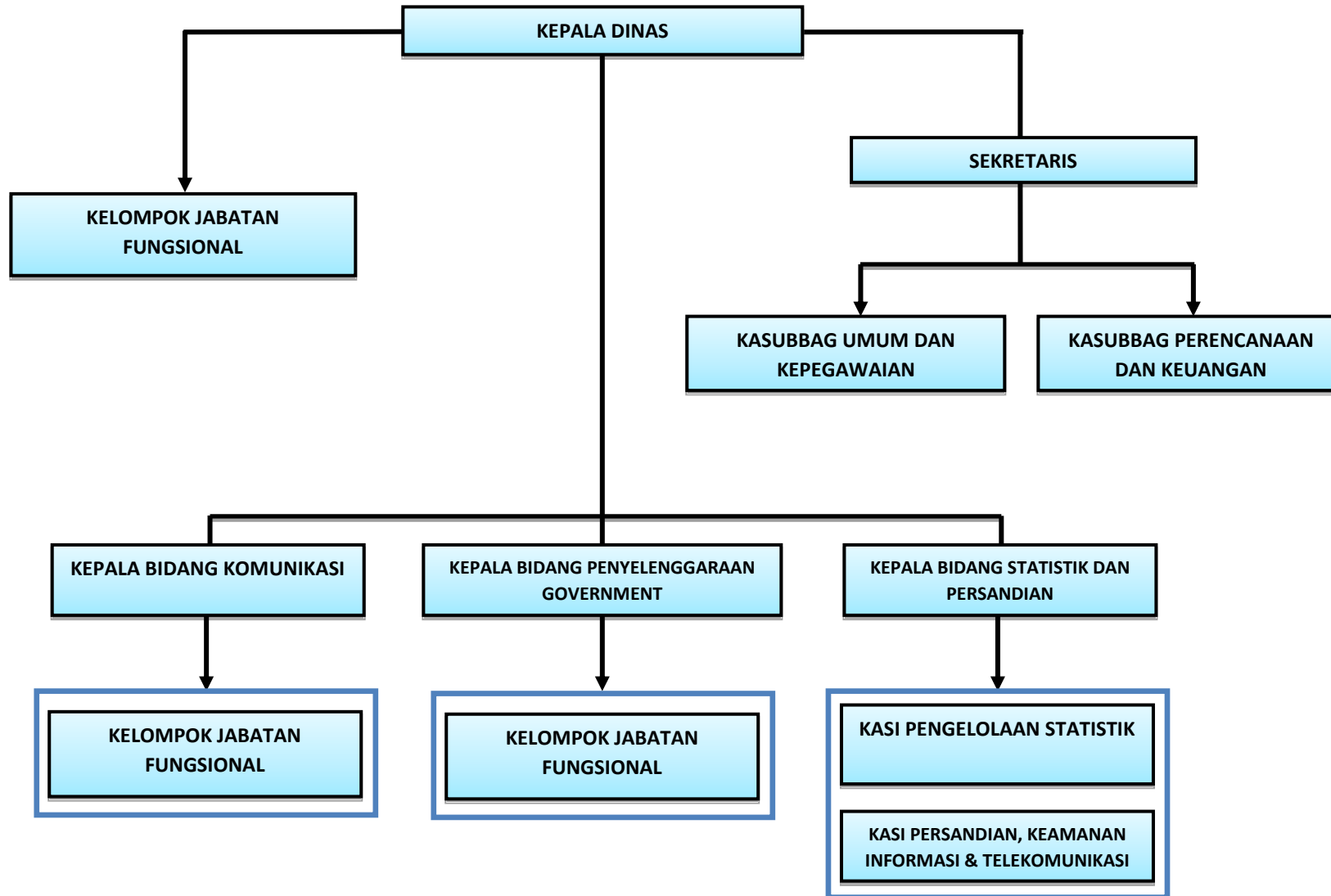
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Seksi, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Statistik
 2. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 sebagai berikut:

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT



Kedudukan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jumlah pada bulan Desember 2023:

No	Status	Jumlah
1	PNS	19
2	CPNS	-
3	PTT	23
Jumlah		42

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2.1

Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Indikator	Satuan	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai/indeks	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Domain 1 - Kebijakan SPBE Domain 2 - Tata Kelola SPBE Domain 3 - Manajemen SPBE Domain 4 - Layanan SPBE	2,00	2,20	2,40	2,60	3,15	2,75	2,82	3,12	3,20	3,30	<p>- Perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar SKPD dan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>- Perlunya proses sinergi baik dari Tim Koordinasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE.</p> <p>- Perlunya optimalisasi penerapan audit TIK di Kabupaten Tanah Laut.</p>

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengoptimalan penggunaan Command Center.
3. Peningkatan kemampuan server pada sistem pusat data Pemerintah Daerah.
4. Pengembangan Aplikasi penunjang SPBE daerah yang dilengkapi dengan pengamanan aplikasi dan informasi sesuai dengan kriteria nasional.
5. Penyediaan dokumen tata kelola TIK sebagai referensi penerapan TIK.
6. Memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik sebagai media informasi pemerintah daerah.
7. Penyediaan data sektoral terpadu yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
8. Peningkatan pengamanan data dan informasi dokumen elektronik

menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari BSSN.

Isu-isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran dan Kebijakan RPD periode 2024-2026
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

SPBE merupakan isu utama bagi unsur komunikasi dan informasi seluruh dinas komunikasi dan informatika Indonesia. Melalui SPBE ini sistem pemerintahan diharapkan tidak secara manual lagi, tapi menggunakan sistem elektronik. Poin utama dalam SPBE adalah :

- Domain Kebijakan
- Domain Tata Kelola
- Domain Manajemen
- Domain Layanan

2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan berani masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbarukan guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data center* serta aplikasi dan infrastruktur penunjangnya dalam mendukung *Smart Government* menuju terwujudnya Satu Data Indonesia.

4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam sistem pemerintahan. Untuk menjamin keamanan dalam sistem aplikasi, maupun data, maka diperlukan sistem keamanan informasi yang bersifat preventif maupun penanganan kasus siber.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan melalui top down Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1 Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanah Laut
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanah Laut

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Sumber Usulan	Pola Kegiatan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						Top down
	2.16.03.2.02 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	- 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Penyediaan Jaringan Internet Desa (Last mile) di Kecamatan Bajuin	319.680.000	Top down	- pengadan langsung	
JUMLAH				319.680.000			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan, tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi Daerah yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi yang ada ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keberhasilan RPD melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merancang tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Tujuan 1 : Indeks SPBE
Sasaran 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Sasaran 1 : Persentase Pencapaian domain SPBE
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP Kabupaten
Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Indikator Sasaran 2 : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.2.1

Tabel tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan operasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun Anggaran 2025 dijabarkan menurut 3 (tiga) tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana setiap tujuan dijabarkan melalui kebijakan dan program. Secara lebih rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dituangkan dalam tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kependagri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM Sekretariat Diskominfo	86 Nilai	5.524.536.085			88 Nilai	5.801.754.611
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.656.543				4.035.350
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan dinas Perangkat Daerah	7 Dokumen	0	SILPA	Operasional rutin kantor	-	0
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan dinas Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.529.813	SILPA		7 Dokumen	2.783.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	6 Laporan	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 Laporan	1.126.730	SILPA		5 Laporan	1.252.350

2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.062.972.453			100%	4.018.442.569
2.16.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang/bulan	0	DAU SILPA	Operasional rutin kantor	-	0
2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang/bulan	4.058.545.453	DAU SILPA		22 orang/bulan	4.013.572.319
2.16.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	4.427.500	SILPA		5 dokumen	4.870.250
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	46.705.500				100%
2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 paket	0	SILPA	Operasional rutin kantor	-	0
2.16.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43 paket	16.705.500	SILPA		-	0
2.16.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	0	SILPA		-	0

2.16.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	30.000.000	SILPA		5 orang	30.000.000
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	419.047.279			100%	474.303.604
2.16.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	0	SILPA	Pelayanan rutin kantor	-	0
2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.446.101	SILPA		1 paket	9.300.707
2.16.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.06.0002		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	59.999.224	SILPA		4 paket	66.000.000
2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	12.170.896	SILPA		1 paket	13.389.460
2.16.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	0	SILPA		-	0

2.16.01.2.06.0005		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	14.999.748	SILPA		3 paket	22.653.375
2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	6.000.000	SILPA		3 Dokumen	5.400.000
2.16.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	15.000.000	SILPA		2 paket	16.500.000
2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	140 Laporan	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	140 Laporan	299.980.000	SILPA		160 Laporan	274.947.750
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120 dokumen	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120 dokumen	2.451.310	SILPA		140 Laporan	66.112.312
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	47.949.250			100%	0

2.16.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	0	SILPA	Peningkatan layanan mobilitas Dinas	-	0	
2.16.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	0	SILPA		-	0	
2.16.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket mebel yang disediakan	6 Unit	0	SILPA		Pelayanan rutin kantor dan sarana penunjang pada gedung command center diskominfo	-	0
2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket mebel yang disediakan	6 Unit	0	SILPA			-	0
2.16.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	0	SILPA			-	0
2.16.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	5.597.033	SILPA			-	0
2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	0	SILPA			-	0
2.16.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	0	SILPA			-	0
2.16.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	0	SILPA			-	0

2.16.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	42.352.217	SILPA		-	0
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	815.115.060			100%	1.128.687.261
2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	SILPA	Pelayanan rutin kantor	-	0
2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000	SILPA		12 Laporan	284.264.416
2.16.01.2.08.14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	545.115.060	SILPA		12 Laporan	844.422.845
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	129.090.000				100%

2.16.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	SILPA	Pelayanan rutin kantor	-	0
2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.500.000	SILPA		1 Unit	49.722.750
2.16.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	76.590.000	SILPA		8 Unit	76.403.250
2.16.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	38 Unit	0	SILPA		-	0
2.16.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22 Unit	15.000.000	SILPA		40 Unit	20.159.827
2.16.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	SILPA		-	0

2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	SILPA		-	-
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	90%	3.073.217.171			90%	3.239.699.520
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100%	3.073.217.171			100%	3.239.699.520
2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 dokumen	0	SILPA	Operasional Pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Publik di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung terciptanya Keterbukaan Informasi Publik	-	0
2.16.02.2.01.0019		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 rekomendasi	24.260.600	SILPA		3 rekomendasi	30.687.000
2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	12 Dokumen	0	SILPA		-	0
2.16.02.2.01.0023		Penyusunan Konten	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Konten Informasi Publik	750 konten	45.364.580	SILPA		780 konten	117.486.600
2.16.02.2.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 Dokumen	0	SILPA		12 Dokumen	0

2.16.02.2.01.0021		Pengelolaan Media Komunikasi publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	15 media	2.183.650.000		15 media	2.431.680.000
2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	135 dokumen	0	SILPA	-	0
2.16.02.2.01.0017		Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 permohonan	785.806.450	SILPA	5 permohonan	629.845.920
2.16.02.2.01.12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi program atau kebijakan	3 dokumen	0	SILPA	-	0
2.16.02.2.01.0015		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 komunitas	34.135.541		3 komunitas	30.000.000
2.16.02.2.01.13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	-	0	-	0	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	100 Persen	5.679.625.976		100 Persen	4.443.186.400

2.16.03.2.02		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.679.625.976			100%	4.293.003.400
2.16.03.2.01.03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	0	SILPA	-	-	0
2.16.03.2.02.0024		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 perangkat daerah	5.533.550.976		Penyediaan Layanan Internet terpadu Kabupaten Tanah Laut dan pengelolaan command center	31 perangkat daerah	4.293.003.400
2.16.03.2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		146.520.000				150.183.000
2.16.03.2.02.07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	0	SILPA	Pengelolaan dan pengembangan aplikasi daerah penunjang SPBE	-	0
2.16.03.2.02.0020		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	146.075.000	SILPA		3 aplikasi	150.183.000
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	100%	152.115.860			100%	193.449.375
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	100%	152.115.860			100%	193.449.375
2.20.02.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	0	SILPA	Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, agar dapat tersedia Data Statistik Sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.	-	0
2.20.02.2.01.0009		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80 persen	99.165.860	SILPA		90 persen	135.699.375
2.20.02.2.01.03		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	0	SILPA		-	0
2.20.02.2.01.0010		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 dokumen	52.950.000	SILPA		5 Dokumen	57.750.000
2.20.02.2.01.05		Pengembangan Infrastruktur	Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	0	SILPA		1 Unit	0
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	80%	124.828.123			100%	177.100.000

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	100%	124.828.123			100%	177.100.000
2.21.02.2.01.01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	SILPA	Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE (Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital). Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik diwajibkan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dokumen yang dikeluarkan pejabat/PNS perlu diamankan dengan tanda tangan digital untuk menjaga integritas data/informasi dan mencegah pemalsuan.	-	0
2.21.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	87.788.127	SILPA		1 Dokumen	92.400.000
2.21.02.2.01.04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	32 Perangkat Daerah	0	SILPA		-	0
2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah	37.039.996	SILPA		40 Perangkat Daerah	84.700.000
TOTAL						14.554.323.215				13.855.189.906

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan, manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

4.2 Saran

Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaihari, 05 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

NIP. 19680916 199010 1 001



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 555/ 06 -DISKOMINFO/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 60);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas :

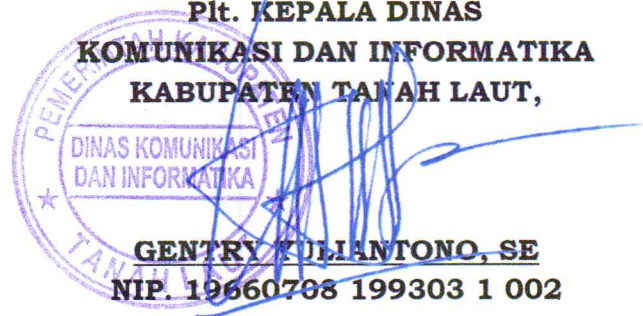
1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
3. melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
4. melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
5. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan rancangan akhir rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
6. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana kerja pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
7. melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan pohon kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
8. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan

penyusunan Renja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**GENTRY KULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002**

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Yth. Asisten Pemerintahan;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 555/ 06 - DISKOMINFO/I/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

No.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim	Instansi
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
2.	Sekretaris	Ketua Tim	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
4.	Kepala Bidang Komunikasi	Koordinator I	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Koordinator II	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Koordinator III	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
7.	Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
8.	Pejabat Fungsional Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
9.	Staf Pelaksana Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
10.	Staf Pelaksana di Sekretariat	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002**